

KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HARAPAN PROFIL KEPALA DAERAH KE DEPAN DI KABUPATEN JEMBER

Lilik Puja Rahayu

Universitas Bondowoso, Indonesia
lilikpujarahayu27@gmail.com

ABTRAKS

Jember merupakan salah satu daerah kabupaten yang berada di kawasan Timur Jawa Timur. Letaknya yang strategis karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur. Jember memiliki keunikan tersendiri karena daerah ini secara umum didiami oleh dua etnis dominan yaitu Suku Jawa dan Suku Madura. Masing-masing etnis ini ada yang saling mempertahankan identitas kesukuannya dan ada pula yang meleburkan kebudayaannya sehingga membentuk pola hibridasi komunitas masyarakat baru yaitu masyarakat Pendalungan (Yuswadi:18: 2001). Selain itu juga, kabupaten ini dipimpin oleh kepala daerah yang dipercaya mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat Jember serta mampu memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang muncul secara tepat dan benar. Berdasarkan hasil penelitian ini, *pertama*, Permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar masyarakat Jember adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa pemerintah kurang serius dalam mengatasi permasalahan tersebut. *Kedua*, Persepsi kepala daerah masa depan yang diinginkan oleh masyarakat jember adalah seorang pemimpin yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

Kata Kunci; Persepsi, Masyarakat, Harapan, Profil

ABTRACT

Jember is one of the districts in the eastern region of East Java. Its strategic location is because it is located at the intersection between Surabaya and Bali, so its development is quite rapid and has become a barometer of economic growth in the eastern region of East Java. Jember has its own uniqueness because this area is generally inhabited by two dominant ethnic groups, namely the Javanese and the Madurese. Each of these ethnic groups maintains their ethnic identity and some merge their cultures to form a new hybrid community pattern, namely the Pendalungan community (Yuswadi: 18: 2001). In addition, this district is led by a regional head who is believed to be able to bring change and progress to the people of Jember and is able to provide solutions to problems that arise appropriately and correctly. Based on the results of this study, first, the main problems faced by the majority of the people of Jember are corruption, collusion and Nepotism, and most people still think that the government is not serious in overcoming these problems. Second, the perception of the future regional head that the Jember community wants is a leader who is oriented towards the interests of the wider community.

Keywords : Perception, Society, Expectations, Profile

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergantian kekuasaan dari rezim tirani otoriter ke rezim reformasi yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan orde lama merupakan titik awal transisi demokrasi di Indonesia. Pergantian kekuasaan di Indonesia tersebut berimplikasi pada perombakan sistem politik secara mendasar, setidaknya pada aras formal. Pola hubungan yang sebelumnya beroperasi secara sentralistik beralur *top-down* bergeser ke arah desentralisasi, otonomisasi dan demokratisasi. Dampaknya lokus pergerakan politik juga berpindah dari sentral kekuasaan pusat mulai masuk pada tingkat daerah atau lokal.

Sejalan dengan paradigma tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang Undang Otonomi Daerah yang berusaha untuk melimpahkan wewenang dari sentralistik ke desentralistik. Undang – undang no 22/1999 (pasal 7 ayat 1). Inti dari undang undang ini adalah memberikan kewenangan penuh untuk menjalankan seluruh bidang pemerintahan kepada daerah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain (Ray, I Wayan: 2001: 78). Sedangkan Daerah menurut UU Otonomi Daerah yang telah disempurnakan no 32 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fathorrasjid, 2007:31).

Momentum ini dianggap merupakan wujud nyata kebangkitan lokalitas. Implikasi praktisnya adalah perhatian mengenai masalah dinamika politik lokal juga semakin meningkat. Di berbagai kalangan wacana lokal dalam beberapa hal mampu menerobos jalur ‘hegemoni mainstream’ politik nasional yang hanya mengkaji area sentra kekuasaan. Dari sinilah studi ini mencoba untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya mengenai kepemimpinan daerah dalam persepsi yang bersifat lokal. Dalam kesempatan ini daerah kajian yang dipilih adalah Jember.

Jember merupakan salah satu daerah kabupaten yang berada di kawasan Timur Jawa Timur. Letaknya yang strategis karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur.

Jember memiliki keunikan tersendiri karena daerah ini secara umum didiami oleh dua etnis dominan yaitu Suku Jawa dan Suku Madura. Masing-masing etnis ini ada yang saling mempertahankan identitas kesukuannya dan ada pula yang meleburkan kebudayaannya sehingga membentuk pola hibridasi komunitas masyarakat baru yaitu masyarakat Pendalungan (Yuswadi:18: 2001)

Manulang (1973), berpendapat bahwa berhasil tidaknya tugas-tugas daerah sangat tergantung pada Kepala Daerah sebagai Manajer Daerah yang bersangkutan. Pendapat tersebut, menunjukkan bahwa keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagian besar ditentukan oleh efektivitas kepemimpinan Kepala Daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegagalan yang dipimpin dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, menunjukkan kegagalan

pemimpin itu sendiri.

Besarnya peranan dan luasnya tugas yang diembannya, Kepala Daerah dituntut menjadi seorang pemimpin yang oleh Hersey & Blanchard (1994), disebut memiliki kepemimpinan yang efektif, atau menurut Osborne & Gaebler (1993), disebut kepemimpinan berjiwa wirausaha, atau istilah Burns (1978) disebut kepemimpinan transformasional, dan oleh Nanus (2001) disebut kepemimpinan visioner. Kepemimpinan kepala daerah yang dinamis dan efektif dibutuhkan, seperti dikatakan Hersey & Blanchard (1994), bahwa organisasi yang berhasil memiliki sebuah ciri utama yang membedakannya dengan organisasi yang tidak berhasil yaitu kepemimpinan yang dinamis dan efektif.

Sayangnya model kepemimpinan tersebut bagi masyarakat Indonesia masih menjadi suatu hal yang 'langka', karena krisis yang berkepanjangan yang terjadi telah meluas hingga ke arah krisis kepemimpinan (Kompas, 19 April 2008). Inu Kencana (2003: 112) menyebutkan enam poin patologi kepemimpinan di Indonesia 1) budaya feodalistik, 2) kebiasaan menunggu petunjuk dari atasan, 3) loyalitas pada atasan bukan organisasi, 5) belum berorientasi pada prestasi, 6) keinginan untuk melayani masyarakat masih rendah.

Bagi kalangan LSM dalam harian Kompas (19 April 2008) mengatakan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah seorang pemimpin yang memiliki ide atau konsep Indonesia untuk hari ini dan esok (*visionerleadership*).

Isu-isu kepemimpinan tersebut lebih bersifat nasional dan bagi kalangan tertentu merupakan angin segar yang akan berdampak positif bagi kehidupan perpolitikan Indonesia. Bagaimana pula dengan yang terjadi pada daerah-daerah di Indonesia, apakah isu-isu tersebut juga mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara menyeluruh. Rupanya

untuk mengetahui hal ini perlu diadakan beberapa kajian yang bersifat lokal. Kajian ini dibutuhkan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pemimpin mereka. Untuk mengetahui peran aktif masyarakat tersebut dibutuhkan suatu kajian yang dalam mengenai persepsi masyarakat akan kepemimpinan di masa depan yang diinginkan. Berdasarkan berbagai macam penjelasan tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil judul "KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HARAPAN PROFIL KEPALA DAERAH KE DEPAN DI KABUPATEN JEMBER".

PEMBAHASAN

1. Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang melahirkan kesadaran atas sesuatu hal melalui perantara pikiran sehat. Persepsi menyangkut dua proses kerja yang saling berkaitan yakni menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan inderawi lainnya, kemudian penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tadi dengan struktur pengertian (ketakinan relevan yang muncul dari pengalaman masa lalu) seseorang dan struktur evaluatif (nilai-nilai yang dipegang).

Jalaludin Rahmat mengatakan bahwa Persepsi merupakan pengalaman tentang obyek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengembangkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam pengertian yang lain, persepsi merupakan proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih lewat penggunaan simbol-simbol atau tanda-tanda (Kamanto Sunarto: 2000: 97).

Dalam konteks ini persepsi dikemukakan oleh masyarakat Jember mengenai profil kepala daerah yang mereka harapkan dimasa mendatang. Berdasarkan pengertian yang ada di atas persepsi yang

akan dikemukakan oleh masyarakat Jember berarti pandangan mereka berdasarkan hasil pengalaman mereka selama berada di Jember. Hasil pengalaman tersebut mereka evaluasi, diatur sedemikian hingga dan menafsirkan akan sesuatu berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari disekitarnya.

2. Masyarakat

Dalam buku Sosiologi suatu pengantar, Mac Iver dan Page menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai macam kelompok, golongan, pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan sosial yang selalu berubah. Konsep lain mengenai masyarakat diungkapkan oleh Ralph Linton sebagai berikut:

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Soekanto:1990;26).

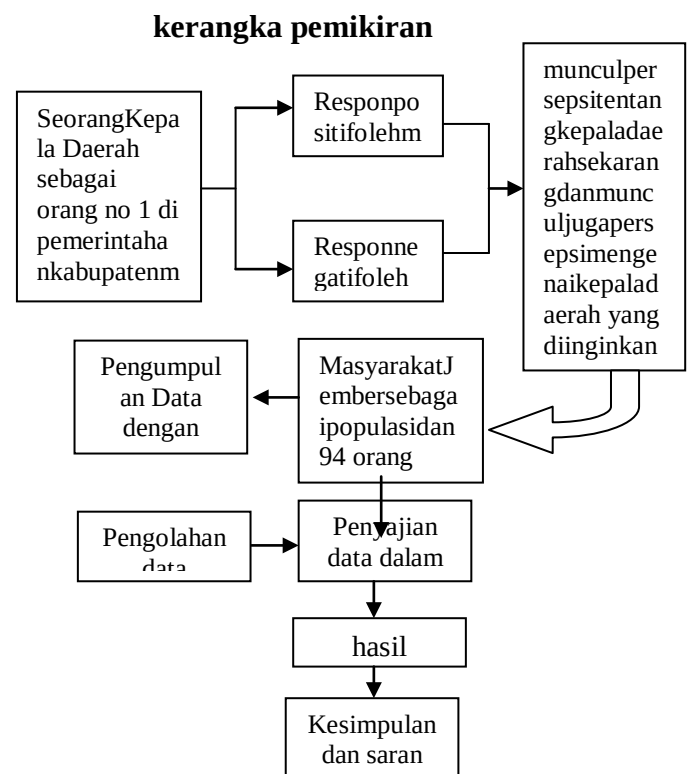
3. Kepala Daerah

Berdasarkan penjelasan UU no 2 tahun 1999 Wewenang Pemerintah daerah antara lain dalam hal mengelola sumber daya nasional (pasal 10 ayat 1), mengelola wilayah laut (pasal 10 ayat 1), kewenangan kepegawaian daerah (pasal 75-76), kewenangan melakukan kerja sama antar daerah (pasal 87), kerja sama dengan badan atau lembaga luar negeri (pasal 88).

Dalam kaitannya dengan posisi ini berarti bahwa sosok kepala daerah sebagai posisi puncak dari aparatur daerah diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam menyelenggarakan

berbagai peranan tersebut berupa pelayanan publik yang makin baik. Pelayanan publik berupa pelayanan kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan, pertahanan, lingkungan hidup serta stabilitas kehidupan sosial ekonomi.

Untuk mewujudkan semua itu pemerintah daerah secara profesional diharapkan mampu menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kinerja unit organisasinya. Kemampuan profesional dalam pengelolaan sumber daya alam, kepegawaian serta sumber-sumber keuangan daerah (Azhari: 2001: 65).



METODOLOGI PENELITIAN

1. Setting dan Lokasi Penelitian

Penelitian kali ini dibatasi pada kawasan Jember terutama pada daerah kotatiff Jember. Sementara populasi diambil dari seluruh masyarakat Jember.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dan disajikan dalam bentuk prosentase hasil analisis data yang diperoleh dari persepsi responden. Sesuai dengan metode kuantitatif, penulis akan menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat-kalimat serta bagan-bagan yang berfungsi sebagai pembantu di dalam penafsiran bagan-bagan yang berkaitan dengan data yang ada.

3. Desain sampling dan Teknik Koleksi Data

a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Masyarakat Jember telah menetap di Kabupaten Jember dengan ketentuan:

- 1) Keadaan sehat jasmani dan rohani
- 2) Memiliki identitas asli kabupaten Jember

Penentuan pengambilan populasi didasarkan pada data penduduk yang terdapat di Jember dalam angka Tahun 2020 adalah sebanyak 2,536 juta jiwa.

b. Sampel Penelitian

Penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Snedecor dan Cochran dalam Budiarto (2003) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2} \\&= \frac{(1,96)^2 \cdot (0,5) \cdot (0,5)}{(0,1)^2} \\&= 96,04\end{aligned}$$

Karena populasi tersebut lebih dari 10.000 maka rumus tersebut dilakukan koreksi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n_k &= \frac{n}{1 + \frac{n}{N}} \\&= \frac{96,04}{1 + \frac{96,04}{4001}} \\&= \frac{96,04}{1 + 0.23994} \\&= \frac{96,04}{1.023994} \\&= 93,78 \text{ dibulatkan menjadi } 94\end{aligned}$$

Keterangan:

- Z = Simpangan rata-rata distribusi normal standar pada derajat kemaknaan 95% yaitu 1,96
p = Proporsi variabel yang dikehendaki, karena tidak diketahui maka diambil proporsi terbesar, yaitu 50%
q = $(1 - p) = 1 - 0,5 = 0,5$
d = Kesalahan sampling yang masih dapat ditoleransi, yaitu 10%
n = Besar sampel
 n_k = Besar sampel setelah dikoreksi
N = Besar populasi (Budiarto, 2003)

c. Cara Pengambilan Sampel

Kriteria penentuan sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tercatat sebagai penduduk asli jember
- 2) Berada di tempat penelitian saat dilakukan kunjungan.
- 3) Bersedia mengisi kuesioner (*informed consent*)

Dalam pengambilan sampel penelitian ini digunakan cara atau teknik-teknik tertentu, sehingga sampel tersebut sedapat mungkin mewakili populasinya. Teknik ini biasanya disebut 'teknik sampling' (Notoatmodjo, 2005). Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple Random Sampling*.

Walaupun dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling akan tetapi dalam mengambil sampel peneliti mencari dalam berbagai strata baik PNS,

Pengusaha, ahkan tukang sampah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang representatif.

C. Variabel, Definisi Operasional

Tabel 3.3 Variabel dan Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional
1.	Karakteristik warga Jember	warga yang telah menetap di jember minimal 5 tahun
a.	Jenis kelamin	Ciri fisik dan biologis yang membedakan laki-laki atau perempuan
b.	Umur	Usia responden sesuai KTP atau kartu identitas lain yang berlaku pada saat penelitian dilakukan
c.	Pekerjaan	Pekerjaan didasarkan pada status pekerjaan yang disandang oleh responden. Pekerjaan disini bisa sebagai PNS, Pengajar, Pengusaha bahkan tukang becak.
2.	Persepsi	Gambaran mengenai sesuatu. Gambaran ini didapat dari hasil informasi yang diterima oleh individu
3.		

4.

Kepala daerah

terhadap peristiwa dis penelitian kali ini adalah Jember menggambarkan mereka inginkan di masa

adalah orang yang m mengatur dan mengelola kegiatannya bisa menda atau sebaliknya pertent merupakan sosok pemi diinginkan oleh warga.

4. Metode Pengumpulan dan Teknik Analisa Data

Ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam analisis data yaitu: (1) data *reduction* (2) data *displaced* (3) *conclutiondrawingverivication*.

ANALISA TEMUAN PENELITIAN

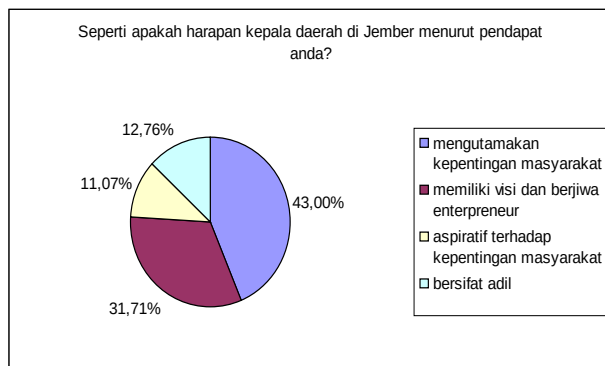
4.1 Analisa Temuan Penelitian

Dalam penelitian kali ini penggalan data yang berkaitan dengan pemimpin yang ada sekarang dan telah lewat dipandang perlu sebagai sebuah pengalaman yang dialami oleh responden. Pengalaman yang ada akan dievaluasi, diklasifikasi sedemikian hingga sehingga melahirkan sebuah bentuk persepsi baru mengenai

kepala daerah mereka.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai kondisi pemerintahan saat ini merupakan penguat, dan akan menjadi landasan bagi masyarakat Jember untuk menganalisa kepemimpinan yang mereka inginkan di masa depan. Berdasarkan bagan diatas ternyata maraknya paraktek Korupsi, Koluasi dan Nepotisme menjadi permasalahan yang oleh sebagian besar kalangan sebagai persoalan yang harus diatasi dan praktek ini masih ada. Sangat ironis, mengingat perjuangan untuk mengatasi hal ini sudah dilakukan sejak dua dekade terakhir. Akan tetapi yang menarik disini adalah ternyata posisi kedua sebanyak 31,91 meruapakan permasalahan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi. Semenjak kita memasuki masa reformasi memang kestabilan ekonomi belum bisa dicapai oleh masyarakat Indonesia secara

umum. Sekalipun terdapat otonomi daerah dimana kewenangan pemerintahan daerah untuk mengelola daerahnya menjadi lebih besar, ternyata dampak ekonomi belum juga dirasakan oleh masyarakat Jember. Naiknya standard hidup dan masih sempitnya lahan pekerjaan bagi penduduk merupakan beberapa faktor penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah daerah.



Bagi masyarakat yang tidak memilih KKN sebagai permasalahan utama lebih disebabkan apatisme masyarakat mengenai praktek KKN. Bagi sebagian Kalangan praktek ini akan sangat sulit untuk ditanggulangi dalam waktu yang relatif singkat.

Permasalahan yang ketiga adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (44,47%). Persoalan rendahnya SDM bukanlah hal yang pada masyarakat Jember. Sebagai daerah yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan merupakan daerah terbesar ketiga di Jawa Timur, ternyata berdasarkan Indeks pembangunan manusia Jawa Timur, Jember merupakan kabupaten yang memiliki standar kelayakan hidup yang terendah. Permasalahan ini merupakan cerminan dari rendahnya sumber daya manusia dalam mengelola wilayahnya.

Dalam menghadapi persoalan yang utama nampaknya masyarakat menilai Sebanyak 68,08% masyarakat belum merasakan langkah-langkah yang serius dari pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Namun demikian

31,91% masyarakat melihat adanya langkah-langkah penanggulangan untuk mengatasi persoalan tersebut. Jika melihat dari indeks pembangunan yang tertera diatas bisa diketahui sejauh mana kinerja pemerintah dalam menanggulangi persoalan tersebut. Rendahnya standart kelayakan hidup masyarakat merupakan indikasi sedikitnya langkah, atau bahkan bisa dikatakan sebagai gagalnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani permasalahan di Jember.

Berkenaan dengan kepala daerah di masa depan, masyarakat Jember sebagian besar menginginkan pemimpin atau kepala daerah yang mampu mengutamakan kepentingan masyarakat. Sementara dibawahnya ada aspiratif terhadap kepentingan masyarakat prosentasenya lebih kecil. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa aspiratif bukan berarti selalu baik, maksudnya disini setiap keinginan yang ada di masyarakat seringkali baik dan buruk dan masyarakat menilai seorang pemimpin yang hanya aspiraif terhadap rakyat tanpa mampu mengemban amanah dalam mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas tidak memenuhi kriteria mereka sebagai pemimpin di masa depan.

Memiliki visi kedepan dan memiliki jiwa *entrepreneur* juga menjadi telah menjadi wacana yang penting dan oleh 31,71% masyarakat dinilai sebagai kriteria yang diinginkan oleh masyarakat Jember mengenai kepala daerah masa depan. Kejelasan visi akan menjadi pedoman awal bagi seorang pemimpin dalam membangun daerahnya. Kejelasan visi juga mengandung arti sejauh mana pemimpin mengetahui daerah yang dipimpinnya, visi disini seorang pemimpin akan mengarahkan kemana daerah ini akan dibawa. Sebanyak 31,19% masyarakat Jember memandang pemimpin dengan kriteria ini menjadi penting.

Presentase mengenai kepemimpinan yang Adil 12,76%. Bagi masyarakat Jember

memiliki sifat yang adil mutlak diperlukan oleh seorang pemimpin. Akan tetapi masyarakat Jember menyadari bahwa sifat adil saat ini bukan menjadi satu-satunya hal yang dibutuhkan, karena disamping menjadi adil, seorang pemimpin memiliki tujuan akhir yaitu untuk kepentingan masyarakat secara luas, dan memiliki semangat wirausaha untuk menjaga eksistensinya dalam menghadapi era yang semakin dinamik dan global.

Persepsi masyarakat jember mengenai kepala daerah sangat beragam, hal ini mengindikasikan kompleksnya permasalahan yang ada di kabupaten jember. Untuk itu perlunya penanganan yang serius dari pemerintah daerah terkait untuk segera menaggulangi permasalahan tersebut.

Perbedaan persepsi mengenai kepemimpinan kepala daerah sangat tergantung pada kepekaan masyarakat Jember akan lingkungan sekitar dan perbedaan latar belakang pendidikan akan turut menjadi faktor penyebab perbedaan persepsi masyarakat Jember

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang ada pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar masyarakat Jember adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa pemerintah kurang serius dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2. Persepsi kepala daerah masa depan yang diinginkan oleh masyarakat jember adalah seorang pemimpin yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

_____, <https://jemberkab.bps.go.id/>

Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi penelitian Kuantitatif*. Kencana. Jakarta.

Sunarto, Kamanto.2000. *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.Jakarta.

Fisher,B Aubrey. 1978. *Teori-teori Komunikasi*, CV.Remadja Karya. Bandung

Kansil, CST. 1991. *Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah*.CV Rineka Cipta. Jakarta.

Widjaya, A.W. 1998. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*.PT. Raja Grafindo Perkasa.Jakarta.

Jalaludin, Rahmat. 1995. *Metode Penelitian Komunikasi*. CV. Remaja Karya. Bandung.

Soekanto,Soerjono.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta

Giddens, Anthony. 1995. *Kapitalis medan Teori Sosial Moderen*. UIPRESS. Jakarta

Yuswadi, Hary. 2001. *Masyarakat (Pendalungan) Jember: Pola Hibridasi Budaya Antar Etnis*. JSPB, volume 1 Nopember 2001. Jember.

_____, 2005.Melawan Demi Kesejahteraan: Perlawanan Petani Jeruk Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian. KompyawisdaJatim. Jember.

Azhari, Kholiq. 2001. *Beberapa Prinsip Dasar Profesionalisme dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Baru*. JSPB, volume 1 Nopember 2001. Jember.

Dirjosuseno, priyatmoko, dkk.2007. *Penataan Kelembagaan dan Efektifitas Pemerintahan Daerah*. Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur. Surabaya.